

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pemerintah di negara manapun dapat jatuh atau kuat berdiri berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil atau tidaknya program-program pembangunan sering di nilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah dan tinggi rendahnya mutu aparatnya di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang dihasilkannya.

Indonesia dikenal dengan sistem pemerintah dimana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam memberikan arah pembangunan. Namun, dengan berkembangnya jumlah penduduk meningkatnya perkembangan zaman dan sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah, dan semakin kompleksnya permasalahan sosial ekonomi dan politik yang dihadapi oleh bangsa menyebabkan birokrasi pemerintah yang sentralistik tersebut dirasakan tidak lagi cukup efektif (Hamzah dkk, 2003)

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi menyebabkan kecepatan pengambilan keputusan menjadi suatu kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan peran

Pemerintah Daerah menjadi sangat penting. Selain itu, munculnya era perdagangan bebas menyebabkan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap efisiensi dan efektifitas sektor publik di setiap daerah. Hal ini sulit untuk dicapai apabila sistem birokrasi pemerintah Indonesia masih sentralistis karena aparat daerah mempunyai otoritas terhadap pengelolaan Sumber Daya Lokal dan pengembangan kepentingan daerahnya.

Untuk meminimalisir keadaan tersebut harus diberlakukan kebijakan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. hal itu dapat dilakukan dengan tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah (pemerintah daerah), yang di kenal dengan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Alasan-alasan yang menyebabkan lahirnya tuntutan tersebut. Adalah, *pertama*, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, otonomi daerah merupakan

jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Di era seperti ini, dimana *globalization cascade* sudah semakin meluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi, serta transaksi keuangan (Mardiasmo, 2002: 3-4).

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. Khusus untuk merealisasikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, maka pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pengalihan pembiayaan atau desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas

pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003: 83). Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip tersebut berarti setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Menurut **Tiebout** dan **Oates**, alasan ekonomi utama yang mendasari desentralisasi fiskal adalah berdasarkan pada dua asumsi, yaitu:

1. Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah local berada pada posisi yang lebih tepat dibandingkan dengan pemerintah pusat atau nasional untuk menyediakan pelayanan publik karena pemerintah lokal memiliki informasi yang lebih baik mengenai selera masyarakat lokal daripada pemerintah pusat.
2. Mobilitas penduduk dan kompetisi antar pemerintah lokal untuk menyediakan pelayanan publik akan menjamin kesesuaian antara kebijakan masyarakat dengan pemerintah lokal.

Salah satu tolok ukur untuk menilai dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan penjumlahan hasil-hasil kegiatan ekonomi di suatu daerah selama satu tahun. Dibawah ini, terdapat perkembangan PDRB menurut pulau di Indonesia sebelum kebijakan desentralisasi fiskal ditetapkan.

Tabel 1.1
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Pulau tahun 1994-2000
Sebelum Diberlakukannya Desentralisasi Fiskal di Indonesia (juta Rupiah)

PROVINSI	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Sumatera	72.856.105	82.186.499	87.865.121	91.323.027	84.030.324	86.201.925	89.399.144
Jawa	206.788.103	223.931.420	243.131.751	254.382.151	212.946.543	216.693.859	234.619.215
Bali	6.117.234	6.602.722	7.141.773	7.556.533	7.250.948	223.993.260	7.521.841
Kalimantan	31.502.302	33.364.773	36.499.006	38.411.267	37.189.372	38.774.113	40.132.646
Sulawesi	14.366.605	15.544.855	16.834.212	17.621.325	16.801.974	17.419.573	18.297.141
Lainnya	13.295.253	14.972.944	16.532.697	17.502.821	18.002.412	16.603.819	17.943.453

Sumber: Biro Pusat Statistik, data diolah

Berdasarkan tabel tersebut Pulau Jawa mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap PDRB. Lebih dari 60% PDRB. Besarnya sumbangan ini karena pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah ini. Pulau Sumatera merupakan kontributor ke dua setelah Pulau Jawa dan Bali yaitu sebesar 22.28% PDRB dengan Migas pada tahun 1993 dan 21.26 % pada tahun 1996 sedangkan non Migas sebesar 18.05% pada tahun 1993 dan 18.14% pada tahun 1996. Sedangkan Pulau Kalimantan dan lainnya menyumbang PDRB lebih rendah bila dibandingkan pulau Jawa-Bali dan pulau Sumatera.

Untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, dibawah ini, terdapat perkembangan PDRB menurut pulau di Indonesia setelah kebijakan desentralisasi fiskal ditetapkan

Tabel 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Pulau 2001-2007
setelah kebijakan desentralisasi fiskal ditetapkan (juta rupiah)

Pulau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Sumatera	290.202.544	324.270.557	346.714,59	356.878,95	369.611,70	389.067,45	408.376,62
Jawa	810.545.329	926.109.712	908.599,15	957.573,91	1.012.598,19	1.071.135,54	1.137.229,13
Bali	18.975.167	948.172.618	19.080,90	19.963,24	21.072,44	22.184,68	23.497,05
kalimantan	129.986.617	146.119.841	144.603,30	148.957,86	154.803,53	160.687,21	165.740,69
Sulawesi	61.515.147	69.206.860	65.960,74	69.714,47	74.079,88	79.211,59	84.662,36
Lainnya	51.819.613	52.958.816	53.777,10	50.947,65	58.063,67	55.708,02	58.512,93

Sumber: Biro Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik tersebut diperoleh bahwa Pulau Jawa setiap tahun memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap perkembangan PDB dibandingkan pulau-pulau yang lain. Pada periode penelitian (2001-2007) Pulau Jawa memberikan kontribusi tertinggi, dan P. Sumatera, P.Kalimantan P.Sulawesi dan P.Bali.Pada tahun 2003 hingga tahun 2005 jumlah PDRB Pulau Jawa sebesar 59%, dan P.Sumatera sebesar 22%. Dan Tahun 2006 hingga 2007 PDRB P.Jawa sebesar 60% dibandingkan Pulau yang lainnya

Mengingat pertumbuhan PDRB sangat menentukan PDB di Indonesia, maka penulis menyajikan data pertumbuhan PDB di Indonesia pada periode penelitian.

Tabel 1.3
 Produk Domestik Bruto (juta US\$) atas dasar harga konstan 2000
 di Indonesia Periode 1993-2007

Tahun	PDB (juta Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)
1993	1,104,459.16	-
1994	1,194,526.46	7.54
1995	1,301,510.64	8.22
1996	1,411,923.03	7.82
1997	1,481,556.17	4.70
1998	1,309,606.03	-13.13
1999	1,333,067.01	1.76
2000	1,389,769.60	4.08
2001	1,442,984.60	3.83
2002	1,506,124.40	4.38
2003	1,577,171.30	4.71
2004	1,656,516.80	5.03
2005	1,750,656.10	5.68
2006	1,847,292.90	5.52
2007	1,963,974.30	6.31

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, BI, data diolah

Berdasarkan perkembangan PDB di atas, dapat diketahui bahwa hampir setiap tahunnya PDB yang dihasilkan sektor produktif Indonesia mengalami peningkatan. Penurunan terjadi pada tahun 1998, hal ini dikarenakan pada saat itu krisis keuangan

tengah melanda Indonesia. Pada periode penelitian sebelum desentralisasi fiskal (1994-2000) tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia cukup stabil, hanya saja pada tahun 1998 tingkat pertumbuhan sangat rendah karena adanya resesi global. Meski pada periode setelah penelitian tingkat pertumbuhan dapat kembali membaik, namun peningkatannya tidak seperti pada periode sebelum diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Berdasarkan ke tiga tabel diatas, diketahui bahwa perkembangan PDB dan PDRB setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali tahun 1998 karena pada tahun ini terjadi krisis keuangan yang tengah melanda Indonesia. Untuk perkembangan PDRB sebelum desentralisasi fiskal dapat dilihat bahwa PDRB yang diperoleh setiap Pulau lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB setelah desentralisasi fiskal. Hal ini tentu karena adanya kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga setiap daerah memiliki otonomi untuk mengelola perekonomian keuangan daerah yang dapat disesuaikan dengan Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah. Namun, perolehan PDB Indonesia mengalami peningkatan pada periode setelah kebijakan desentralisasi fiskal, padahal PDRB yang dihasilkan setiap Pulau justru menurun.

Pada tahun 2003 hingga tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 4,78 % - 5,60 %, sedangkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2005 hanya 3,20%. Tetapi berdasarkan pertumbuhan ekonomi tiap daerah di Indonesia, menunjukkan adanya disparitas. Disparitas terjadi antara rata-rata pertumbuhan ekonomi P. Sulawesi dan P. Jawa dengan pulau-pulau yang lain, yaitu P. Sumatera, P.

Kalimantan, P. Bali dan Nusa Tenggara serta P. Maluku, Maluku Utara dan Papua. Faktor penyebab disparitas antar daerah salah satunya adalah kurang lancarnya perdagangan antar pulau yang disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai.

Miftah farid (2007) mengungkapkan dalam penelitiannya tentang “pengaruh disparitas antar daerah dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel propinsi”, apabila dilihat perbandingan pertumbuhan ekonomi per pulau, pada tahun 2003 disparitas pertumbuhan ekonomi per pulau sangat terlihat jelas sesuai dengan nilai pertumbuhan rata-rata PDRB per kapita pulau. Rata-rata pertumbuhan PDBR per kapita per pulau tertinggi terjadi di Pulau Sulawesi yang mencapai 4,32 % dan Pulau Jawa sebesar 3,88 %. Disparitas terjadi antara rata-rata pertumbuhan ekonomi kedua pulau di atas dengan pulau-pulau yang lain, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara serta Pulau Maluku, Maluku Utara dan Papua. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita di Pulau Sumatera hanya sebesar 0,70 %, Pulau Kalimantan sebesar 2,02 %, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,64 %, Pulau Maluku, Maluku Utara, Papua hanya sebesar 0,78 %.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Makmun (2004)** Secara umum rata-rata perkembangan PDRB kabupaten dan kota sebelum desentralisasi fiskal (1993 – 1999) tumbuh sebesar 30,63% atau naik dari Rp 872.791,28 juta pada tahun 1993 menjadi Rp 2.476.712,83 juta tahun 1999. Sedangkan pada periode desentralisasi fiskal (2001- 2002) rata-rata pertumbuhan PDRB naik 21,29% menjadi 1.525.891.660,47 juta (2002). Apabila kita bandingkan dengan sebelum desentralisasi

fiskal, nampak bahwa pada periode desentralisasi fiskal, rata-rata pertumbuhan PDRB per kabupaten/kota mengalami penurunan. Penurunan PDRB ini kemungkinan lebih disebabkan oleh pemekaran sejumlah kabupaten dan kota baru yang berdampak pada penurunan PDRB kabupaten dan kota yang dimekarkan menjadi negatif pertumbuhannya.

Dalam desentralisasi fiskal yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001, disebutkan bahwa sistem pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Wacana tersebut memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang upaya menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal.

Menurut **Tambunan** (2001), faktor-faktor penyebab disparitas antar daerah di Indonesia antara lain adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah, perbedaan sumber daya alam (SDA), perbedaan kondisi geografis antar wilayah, dan kurang lancarnya perdagangan antar propinsi.

Di satu sisi pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan di sisi lain disparitas cukup tinggi, hal ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro daerah.

Mengingat pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah maka penulis mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **“PENGARUH INVESTASI DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA TAHUN 1994-2007”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan yang menarik untuk diajukan dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
- Bagaimanakah pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
- Bagaimana Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
- Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
- Bagaimana Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
- Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
- Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
- Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
- Untuk mengetahui Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai informasi tambahan bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia.
- 2) Memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya masalah Pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- 3) Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut mengenai pertumbuhan ekonomi